

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvin Tofler, dalam Nurcholis Madjid, *Tradisi Islam, Pengawasan dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Arikunto S., *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badudu J.S., dan Zain Z.M., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Eksistensi*, Badan Pengembangan dan Pembinaan, Balai Pustaka: Jakarta, April 2014.
- , *Pengertian Eksistensi*, Wikipedia Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 1997.
- Katini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moeleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1990, 2000.
- Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metode Penelitian*, CV. Fajar Agung, Jakarta, 1998.
- Nazir M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.
- , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Rachman, 1999: 71
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979).

Suradinata, Ermaya, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pasal 153.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 pada Bab V tentang Susunan Organisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf c (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 55, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Google.com., Pengertian Eksistensi Menurut Para Ahli, Artikel Journal (*Online*), (<http://www.duniapelajar.com/2014/07/18/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli>), diakses 10 Desember 2014).